

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Banyak buku, jurnal, artikel dan sumber ilmiah lainnya yang memaparkan bahasan tentang perempuan korban perdagangan orang. Berikut pemaparan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, Jurnal yang disusun oleh Wahyuni dari jurusan Sosiatri, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, tahun 2016, Universitas Mulawarman Samarinda berjudul *“Peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda Dalam Menangani Kasus Trafiking (Perdagangan Manusia) Khususnya Perempuan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan UPTD. Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda dalam menangani kasus trafiking (perdagangan manusia) khususnya perempuan yaitu bagi korban yang perlu penanganan psikolog hingga rujukan rumah sakit jiwa bagi yang trauma, rujukan RSUD AWS bagi yang mengalami kekerasan fisik, dan korban tidak mengalami trauma / kekerasan fisik diberikan pelayanan teknis untuk mengisi waktu selagi proses pengadilan. Pelayanan teknis yang diberikan meliputi pendidikan agama, budi pekerti, bimbingan fisik dan keterampilan. Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh psikolog agar korban tidak mengalami trauma. Motivasi sosial diberikan sejak korban trafiking datang di panti. Konseling psikolog diberikan oleh psikolog yang bertugas menangani kebutuhan bimbingan dan konseling. Bimbingan keterampilan dalam bentuk membuat kerajinan. Bimbingan sosial dan etika dalam rangka perubahan sikap dan perilaku dan tidak kembali kelingkungan

yang dulu dan pelaksanaannya. Bimbingan mental keagamaan diberikan seperti mengaji dan sholat<sup>7</sup>. Kedua, Tesis Hariyanto, Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial tahun 2011, FISIP Universitas Indonesia Jakarta yang berjudul “*Pelaksanaan Proses Rehabilitasi Sosial Untuk Anak Wanita Usia 15-18 Tahun Korban Trafficking (study kasus di PSKW Mulya Jaya Pasar Rebo)*”. Hasil penelitian menggambarkan proses rehabilitasi sosial, meliputi tahapan pendekatan awal, assessment, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, penyaluran, terminasi dan monitoring, serta peran pekerja sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pekerja sosial berperan sebagai *advocate*, pendamping, *activist*, *mediator*, *enabler*, perantara (*broker*), pendidik (*educator*) dan *inisiator*<sup>8</sup>. Ketiga, Jurnal oleh Aida Fitriani berjudul “*Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Wanita Korban Trafiking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta (Informasi, vol. 18, no. 3, desember 2013, hlm: 159 - 181.)*”. Studi ini mendeskripsikan implementasi program rehabilitasi sosial bagi anak dan wanita korban *trafficking* di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program belum sepenuhnya sesuai dengan sop dan standar pelayanan terbaik. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan organisasi harus meningkatkan programnya agar lebih baik. Peningkatannya termasuk revisi SOP, SOP harus mempunyai standar aktivitas program<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>Wahyuni. Ibid. hlm 100

<sup>8</sup> Haryanto.2011. *Pelaksanaan Proses Rehabilitasi Psikososial Untuk Anak Wanita Usia 15-18 Tahun Korban Trafficking (Studi Kasus di PSKW Mulya Jaya Pasar Rebo)* Tesis tidak diterbitkan. Depok : FISIP Universitas Indonesia

<sup>9</sup> Fitriani, Aida. 2013. *Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Bagi Anak dan Wanita Korban Trafiking di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) Jakarta* : (Informasi, vol. 18, no. 3, desember 2013, hlm: 159 - 181.)

Dari ketiga penelitian diatas, belum ada yang mengangkat tema mengenai Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*). Maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Program Rehabilitasi Psikososial Perempuan Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia Samarinda. Adapun perbedaan pembahasan dalam penelitian ini jika ditinjau dari sudut pandang rehabilitasi psikososial.

## **B. Konsep *Human Trafficking***

Wanita sebagai kelompok yang rentan memiliki hak untuk dilindungi khususnya dalam masalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia dipahami sebagai seseorang yang melakukan penipuan atau kekerasan untuk tujuan eksploitasi melalui cara menjadikan korbannya sebagai pemenuh hasrat seksual, buruh secara paksa bahkan perbudakan. Jelas hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia yang harusnya diakui dan dihormati. Dibawah ini akan dijelaskan tentang definisi *human trafficking*, faktor terjadinya *human trafficking* dan dampak dari *human trafficking*.

### **1. Definisi *Human Trafficking***

Masalah yang menghadang kehidupan perempuan yaitu salah satunya adalah tindak kejahatan perdagangan manusia. Dimana perdagangan manusia merupakan masalah yang luas, kompleks dan menjadi *concern* banyak pihak termasuk dunia internasional. Pada dasarnya korban perdagangan manusia telah diambil secara paksa haknya sebagai manusia. Menurut Undang-undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

“Tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Definisi mengenai perdagangan orang telah mengalami banyak perkembangan sampai ditetapkan *protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in persons especially women and children supplementing the united nation convention against transnational organized crime* tahun 2002. Definisi ini secara substansial lebih rinci dan operasional dikeluarkan oleh PBB dalam protokol, yaitu protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang. Terutama perempuan dan anak-anak. Konvensi PBB tersebut menentang kejahatan terorganisir transnasional tahun 2002 menyebutkan definisi perdagangan orang yang paling diterima secara umum dan secara luas. Pasal 3 protokol ini menyatakan sebagai berikut <sup>11</sup>:

(a) “Perdagangan Manusia” adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik dibawah ancaman atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja

---

<sup>10</sup> Farhana. Opcit. Hlm 24

<sup>11</sup> Farhana. Ibid. Hlm 15

paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

- (b) Persetujuan korban perdagangan manusia atau eksploitasi yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan ketika cara-cara yang disebutkan pada ayat (a) digunakan.
- (c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, dan penampungan atau penempatan anak-anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap sebagai “perdagangan manusia” walaupun ketika hal ini tidak melibatkan cara-cara yang disebutkan dalam ayat (a) pasal ini.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari perdagangan orang adalah :

1. Perbuatan : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima.
2. Sarana (cara) untuk mengendalikan korban : ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan yang memegang kendali atas korban.
3. Tujuan : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan definisi perdagangan orang yang dipaparkan oleh UU No 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang dan Protokol Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang telah diuraikan diatas, disarikan melalui tabel 2.1 dibawah ini. Tabel ini berguna untuk menentukan apakah suatu kejadian termasuk dalam *trafficking*

atau tidak. Kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak salah satu unsur dari ketiga elemen yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan.

**Tabel 2.1**  
**Kerangka perdagangan orang**

No	Proses/Cara	+	Jalan/Cara	+	Tujuan
1.	Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
	Atau		Atau		Atau
2.	Pengiriman	D	Pemaksaan	D	Pornografi
	Atau		Atau		Atau
3.	Pemindahan	A	Penculikan	A	Kekerasan/eksploitasi seksual
	Atau		Atau		Atau
4.	Penampungan	N	Penipuan	N	Kerja paksa
	Atau		Atau		Atau
5.	Penerimaan		Kebohongan		Perbudakan/praktik serupa
			Atau		Atau
6.			Penyalahgunaan kekuasaan		Pengambilan organ tubuh

Sumber : Rosenberg, Ruth. 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia*. hlm 16.

Tabel 2.1 kerangka perdagangan orang yang dikemukakan oleh Rosenberg diatas juga menjelaskan bahwa jika ada seseorang yang mengalami salah satu unsur dari ketiga elemen yakni, meliputi proses, jalan/cara, dan tujuan diatas maka dapat dikatakan dia merupakan korban *trafficking*. Pada elemen pertama jika seseorang mengalami salah satu dari proses yaitu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan dan penerimaan, elemen kedua dengan jalan atau cara mengancam, memaksa, menculik, menipu, membohongi atau menyalahgunakan kekuasaan, dimana semua itu bertujuan untuk prostitusi, pornografi, eksploitasi, kerja paksa, perbudakan maupun pengambilan organ tubuh maka dapat dikategorikan orang tersebut menjadi korban *trafficking*.

## 2. Faktor penyebab terjadinya *Human Trafficking*

*Trafficking* di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks karena juga diperluas oleh berbagai faktor yang mengikutinya. Menurut Lopian & Geru adanya faktor pendorong dan faktor penarik pada kasus *trafficking*. Sebagaimana penjelasan dibawah ini<sup>12</sup>:

### a. Faktor pendorong

- 1) Kurangnya pengetahuan tentang akibat dari trafficking
- 2) Faktor ekonomi (miskin)
- 3) Keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang (kerja tidak terlalu berat)
- 4) Adanya izin dari orangtua
- 5) Mudahnya mendapatkan izin dari pemerintah
- 6) Adanya ikut perkembangan zaman (modern)
- 7) Adanya masalah dalam keluarga dan ingin mencari pelarian.

### b. Faktor penarik

- 1) Adanya iming-iming gaji (pendapatan yang tinggi)
- 2) Keinginan keluar daerah atau keluar negeri untuk mencari pengalaman kerja
- 3) Adanya calo yang bertempat tinggal di desa korban
- 4) Rayuan dari calo untuk bekerja jadi *baby sitter*

Sedangkan menurut Farhana bahwa faktor-faktor perdagangan orang di Indonesia terdiri dari faktor ekonomi, faktor ekologis, faktor sosial budaya, faktor ketidaksetaraan gender dan faktor penegakan hukum. Berikut penjelasannya<sup>13</sup> :

---

<sup>12</sup> Oktamiya, Dinar dkk. 2013. *Upaya Bunuh Diri Sebagai Bentuk Depresi Pada Remaja Putri Korban Trafficking*. Jurnal Dinar Bismillah.  
<http://psikologi.ub.ac.id/wpcontent/uploads/2013/10/jurnal-dinar-bismillah.pdf> (diakses 28 Oktober 2016 pukul 20.55 Wib)

<sup>13</sup> Farhana, Opcit. Hlm 50

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Selama periode September 2014 - Maret 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,29 juta orang (dari 10,36 juta orang pada September 2014 menjadi 10,65 juta orang pada Maret 2015), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 0,57 juta orang (dari 17,37 juta orang pada September 2014 menjadi 17,94 juta orang pada Maret 2015). Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen)<sup>14</sup>.

b. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Susenas 2014 dan 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 254,9 juta jiwa. Dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam perkembangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan

---

<sup>14</sup> Data BPS *Penduduk Miskin Perkotaan Tahun 2015* <http://bps.go.id/brs/view/1158/> (diakses 29 Oktober 2016 22.09)



dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dan dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.

c. Faktor Sosial Budaya

Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik. Perbedaan pendapat menjadi salah satu pemicu timbulnya konflik budaya dan akhirnya menimbulkan kejahatan. Contohnya adalah konflik yang terjadi pada tahun 1998 di Maluku, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah dan Aceh. Situasi tersebut mendorong penduduk untuk pindah dari tempat asal mereka. Oleh karena itu, penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan orang. Hal tersebut dikarenakan oleh sedikitnya pilihan untuk mencari nafkah dan kekuasaan sosial yang kecil.

d. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga seorang anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena

yang *pertama*, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang. Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup. *Kedua*, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial. *Ketiga*, adanya ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. Ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. Sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.

e. Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

1) Faktor penegak hukum

Sering terjadi beberapa peraturan tidak terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan sebagaimana mestinya. Terjadinya korupsi dalam pengurusan-pengurusan dokumen seperti terjadinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi yaitu KTP, akte kelahiran, dan paspor.

2) Faktor hukumnya sendiri

Kebanyakan pelaku perdagangan orang tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas mempengaruhi penegakan hukum. Sarana dan fasilitas antara lain mencakup sumberdaya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

4) Faktor masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang masih sangat rendah. Disamping itu masyarakat juga masih mengalami krisis kepercayaan terhadap penegak hukum

### 5) Faktor kebudayaan

Dalam sebuah keluarga perempuan selalu diberi pendidikan rela berkorban untuk keluarga, sehingga banyak perempuan yang bekerja bukan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk melaksanakan haknya. tetapi sekedar untuk membantu keluarga. Oleh sebab itu, anak perempuan rentan terhadap perdagangan orang.

Sesungguhnya tidak ada satu pun yang merupakan penyebab khusus terjadinya human trafficking di Indonesia. *Human trafficking* dapat disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda seperti yang telah diuraikan di atas.

### 3. Dampak *Human Trafficking*

Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Banyak dampak negatif yang dialami oleh para korban perdagangan manusia bahkan bisa sampai meninggalkan pengaruh yang permanen. Korban tidak hanya mengalami dampak dari segi fisik namun juga dari segi psikologis, dan hal ini akan sangat mempengaruhi kehidupan mereka.

Dari segi fisik, korban yang mengalami kekerasan biasanya mendapatkan luka, cacat, terjangkit penyakit menular, bahkan ada yang sampai meninggal. Sedangkan dampak psikologis yang dialami yaitu stress, trauma, bahkan depresi. Rasa takut pun sering muncul pada korban perdagangan manusia karena teringat dan dibayang-bayangi oleh kejadian buruk yang dialaminya. Luka psikis yang dialami oleh korban perdagangan manusia ini pengaruhnya lebih serius dari luka fisik, karena dapat membuat korbannya merasa kehilangan harga diri bahkan

sampai berpikir untuk mengakhiri hidup karena malu dan selalu dihantui rasa takut. Dampak psikologis yang terjadi pada korban *trafficking*, diantaranya adalah<sup>15</sup>:

- a. Trauma. Sebagian besar korban perdagangan manusia akan mengalami trauma dari dampak kekerasan atau pengalaman yang tidak menyenangkan bagi mereka. Trauma adalah : *“The essence of trauma is that it overwhelms the victim’s psychological and biological coping mechanisms. This occurs when internal and external resources are inadequate to cope with the external threat.”*
- b. Pembatasan gerak. Yaitu kontrol yang dilakukan oleh para *traffickers* telah melampaui batas
- c. Multiple Trauma. Mengalami beberapa atau kronis peristiwa traumatis atau kasar telah ditemukan memiliki efek yang lebih negatif dari trauma tunggal. Sebuah kecemasan korban dapat diungkap, karena banyak korban yang masih menghadapi bahaya nyata terkait pengalaman perdagangan mereka bahkan setelah terjadi eksploitasi.
- d. *Violence*. Korban perdagangan pasti telah mengalami kekerasan baik sebelum dan selama proses perdagangan. Kekerasan sebelum perdagangan terlihat pada sebagian besar korban perdagangan untuk eksploitasi seksual.
- e. *Abuse*. Hal ini biasanya digunakan oleh para *traffickers* bagi korban yang kurang pengetahuannya untuk dipengaruhi secara negatif agar mau melaksanakan apa yang dia perintah.

---

<sup>15</sup>Mawardi. 2014. *Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*  
<https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>.(diakses pada tanggal 29 Desember 2016 pukul 15.25)

- f. *Concurrent Symptoms* . Setelah mengalami perdagangan sebagian besar wanita memiliki banyak simultan masalah kesehatan fisik dan mental. Di antara korban perdagangan gejala kesehatan fisik menyebabkan mereka merasa sakit dan tidak nyaman. Beberapa gejala kesehatan mental mengalami lebih lama.
- g. *Physical symptoms*. Kelelahan dan penurunan berat badan, gejala neurologis, dan gastrointestinal adalah masalah yang paling sering dilaporkan. Banyak korban perdagangan yang hanya memiliki sedikit waktu untuk tidur karena dipaksa untuk melakukan aktivitas terus-menerus. Kurang tidur kronis atau berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi kemampuan individu untuk berkonsentrasi dan berpikir jernih, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh dan kemampuan untuk menahan rasa sakit.
- h. *Post-traumatic stress disorder (PTSD)*. PTSD adalah istilah yang menggambarkan gangguan kesehatan mental yang disebabkan, sebagian, oleh satu atau lebih peristiwa traumatis. Gangguan ini berlangsung dalam jangka waktu lama dalam gejala psikologis yang parah dialami oleh mereka yang telah terkena pengalaman yang telah memiliki efek traumatis pada mereka. Hampir semua orang yang memiliki pengalaman traumatis akan memiliki perasaan *shock*, sedih dan penyesuaian dan tidak semua orang yang mengalami peristiwa traumatis akan menyebabkan PTSD. Karakteristik umum PTSD adalah kecenderungan gejala menurun dari waktu ke waktu di sebagian orang. Studi korban *trafficking* (khususnya untuk eksploitasi seksual) telah menemukan bahwa korban menunjukkan banyak gejala PTSD. Pola penurunan dalam gejala PTSD juga ditemukan dalam korban *trafficking*. PTSD tercermin dalam studi

tentang perdagangan orang adalah bahwa beberapa korban masih memiliki beberapa gejala setelah perdagangan

### **C. Perspektif Teori Psikososial Dalam Rehabilitasi Psikososial**

Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya, hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang (psikologis) terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Seseorang yang sehat mentalnya akan bereaksi dengan cara yang positif dalam banyak situasi. Berbeda dengan orang yang tidak stabil mentalnya, ia akan bereaksi negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup.

Pemikiran yang irasional (tidak rasional) merupakan salah satu tanda kurang sehatnya kondisi psikososial seseorang. Sering munculnya prasangka buruk atau pikiran negatif (*negatif thinking*) terhadap banyak hal yang ada dalam hidup adalah salah satu wujud nyata dari kondisi psikososial yang buruk, yang bisa mengarah pada hubungan sosial yang buruk pula.

Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan

memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Namun, jika penanganan ini dikelola dengan buruk, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak mampu. Dalam bukunya “*Childhood and Society*”, Erikson membuat sebuah bagan untuk mengurutkan delapan tahap secara terpisah mengenai perkembangan ego dalam psikososial, yang biasa dikenal dengan istilah “delapan tahap perkembangan manusia”. Kedelapan tahap perkembangan manusia dalam teori psikososial Erikson tersebut adalah sebagai berikut<sup>16</sup>:

**Tabel 2.2**  
**Delapan Tahap Perkembangan Manusia Menurut Erik Erikson**

Developmental stage	Basic components
Infancy (0-1 thn)	Trust vs mistrust
Early childhood (1-3 thn)	Autonomy vs shame, doubt
Preschool (4-5 thn)	Initiative vs guilt
School age (6-11 thn)	Industry vs inferiority
Adolescence (12-20 thn)	Identity vs identity confusion
Young adulthood (21-40 thn)	Intimacy vs isolation
Adulthood (41-65 thn)	Generativity vs stagnation
Senescence (+65 thn)	Ego integrity vs despair

#### 1. Trust Vs Mistrust (Kepercayaan Vs Kecurigaan)

Masa bayi (infancy) ditandai adanya kecenderungan trust – mistrust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing dia tidak akan mempercayainya. Oleh karena itu kadang-kadang bayi menangis bila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Ia bukan saja tidak percaya kepada orang-orang yang asing tetapi juga kepada

---

<sup>16</sup> Swandarini, Hanum. 2012. *Teori perkembangan psikososial*. Jakarta : Pusat Bahan Ajar dan Elearning Mercubuana.<http://modul.mercubuana.ac.id/files..pdf> (diakses 2 januari 2017)



benda asing, tempat asing, suara asing, perlakuan asing dan sebagainya. Kalau menghadapi situasi-situasi tersebut seringkali bayi menangis.

Pada tahap ini, bayi mengalami konflik antara percaya dan tidak percaya. Rasa percaya menuntut perasaan nyaman secara fisik dan sejumlah kecil ketakutan serta kekhawatiran akan masa depan. Pada saat itu, hubungan bayi dengan ibu menjadi sangat penting. Kalau ibu memberi bayi makan, membuatnya hangat, memeluk dan mengajaknya berbicara, maka bayi tersebut akan memperoleh kesan bahwa lingkungannya dapat menerima kehadirannya secara hangat dan bersahabat. Inilah yang menjadi landasan pertama bagi rasa percaya. Sebaliknya, kalau ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi, maka dalam diri bayi akan timbul rasa ketidakpercayaan terhadap lingkungannya.

## 2. Autonomy Vs Shame, Doubt ( Kemandirian Vs Rasa Ragu dan Malu)

Masa kanak-kanak awal (early childhood) ditandai adanya kecenderungan Autonomy - shame, doubt. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah bisa berdiri sendiri, dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya, tetapi dipihak lain dia mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya.

Pada tahap kedua adalah tahap anus – otot ( anal - muscular stage), masa ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 18 bulan sampai 3 tahun. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian (otonomi) sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu relasi Antara anak dan orangtuanya terdapat suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu

kemandirian. Namun, sebaliknya jika orangtua dalam mengasuh anaknya bersikap salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Dengan kata lain ketika orang tua dalam mengasuh anaknya sangat memperhatikan anaknya dalam aspek-aspek tertentu misalnya mengizinkan seorang anak yang menginjak usia balita untuk dapat mengeksplorasi dan mengubah lingkungannya, anak tersebut akan bisa mengembangkan rasa mandiri atau ketidaktergantungan. Pada usia ini menurut Erikson bayi mulai belajar untuk mengontrol tubuhnya, sehingga melalui masa ini akan nampak suatu usaha atau perjuangan anak terhadap pengalaman-pengalaman baru yang berorientasi pada suatu tindakan/kegiatan yang dapat menyebabkan adanya sikap untuk mengontrol diri sendiri dan juga menerima control dari orang lain. Misalnya, saat anak belajar berjalan, memegang tangan orang lain, memeluk, maupun untuk menentuhkan benda-benda lain.

Dilain pihak anak dalam perkembangannya pun dapat menjadi pemalu dan ragu-ragu. Jikalau orang tua terlalu membatasi ruang gerak/ eksplorasi lingkungan dan kemandirian. Sehingga anak mudah menyerah karena menganggap dirinya tidak mampu atau tidak seharusnya bertindak sendirian.

### 3. Initiative Vs Guilt (Inisiatif Vs Rasa Bersalah)

Tahap inisiatif dan rasa bersalah (initiative versus guilt), yaitu tahap perkembangan psikososial ketiga yang berlangsung selama tahun-tahun prasekolah. Pada tahap ini anak terlihat sangat aktif, suka berlari, berkelahi, memanjat-manjat, dan suka menantang lingkungannya. Dengan menggunakan bahasa, fantasi, dan permainan khayalan, dia memperoleh perasaan harga diri. Bila orang tua berusaha memahami, menjawab pertanyaan anak, dan menerima

keaktifan anak dalam bermain, maka anak akan belajar untuk mendekati apa yang diinginkan, dan perasaan inisiatif menjadi semakin kuat. Sebaliknya, bila orang tua kurang memahaminya, kurang sabar, suka memberikan hukuman, dan menganggap bahwa pengajuan pertanyaan, bermain dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak tidak bermanfaat, maka anak akan merasa bersalah dan menjadi enggan untuk mengambil inisiatif untuk mendekati apa yang diinginkannya.

#### 4. Industry Vs Inferiority (Ketekunan Vs Rasa Rendah Diri)

Tahap ketekunan dan rasa rendah diri (industry versus inferiority), yaitu tahap perkembangan psikososial keempat yang berlangsung kira-kira pada tahun-tahun sekolah dasar. Pada tahun ini anak mulai memasuki dunia yang baru, yaitu sekolah dengan segala aturan dan tujuan. Anak mulai mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Alat-alat permainan dan kegiatan bermain berangsur-angsur digantikan oleh perhatian pada situasi-situasi produktif serta alat-alat yang dipakai untuk bekerja. Akan tetapi, apabila anak tidak berhasil menguasai keterampilan dan tugas-tugas yang dipilihnya atau yang diberikan oleh guru-guru dan orang tuanya, maka anak akan mengembangkan perasaan rendah diri.

#### 5. Identity Vs Identity Confusion (Identitas Vs Rasa Bingung)

Tahap identitas dan kekacauan identitas (identity versus identity confusion), yaitu tahap perkembangan psikososial yang kelima yang berlangsung selama tahun-tahun masa remaja. Pada tahap ini, anak dihadapkan dengan pencarian jati diri. Ia mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri, perasaan bahwa ia adalah individu unik yang siap memasuki suatu peran yang berarti di tengah masyarakat, baik peran yang

bersifat menyesuaikan diri maupun yang bersifat memperbarui. Tetapi, karena peralihan yang sulit dari masa kanak-kanak ke masa dewasa di satu pihak dan karena kepekaan terhadap perubahan sosial dan historis di pihak lain, maka anak akan mengalami krisis identitas. Bila krisis ini tidak segera diatasi, maka anak akan mengalami kebingungan peran atau kekacauan identitas, yang dapat menyebabkan anak merasa terisolasi, cemas, hampa, dan bimbang.

#### 6. Intimacy Vs Isolation (Keintiman Vs Isolasi)

Tahap keintiman dan isolasi (intimacy versus isolation), yaitu tahap perkembangan psikososial keenam yang dialami individu selama tahun-tahun awal masa dewasa. Tugas perkembangan individu pada masa ini adalah membentuk relasi intim dengan orang lain. Menurut Erikson, keintiman tersebut biasanya menuntut perkembangan seksual yang mengarah pada hubungan seksual dengan lawan jenis yang dicintai. Bahaya dari tidak tercapainya keintiman selama tahap ini adalah isolasi, yakni kecenderungan menghindari berhubungan secara intim dengan orang lain, kecuali dalam lingkup yang amat terbatas.

#### 7. Generativity Vs Stagnation (Aktivitas Umum Vs Stagnasi)

Tahap generativitas dan stagnasi (generativity versus stagnation), yaitu tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa. Ciri utama tahap generativitas adalah perhatian terhadap apa yang dihasilkan (keturunan, produk-produk, ide-ide, dan sebagainya) serta pembentukan dan penetapan garis-garis pedoman untuk generasi mendatang. Kepedulian seseorang terhadap pengembangan generasi muda inilah yang diistilahkan oleh Erikson dengan “generativitas”. Apabila

generativitas ini lemah atau tidak diungkapkan, maka kepribadian akan mundur, mengalami pemiskinan dan stagnasi.

#### 8. Ego Integrity Vs Despair (Integritas Vs Keputusan)

Tahap integritas dan keputusan (*integrity versus despair*), yaitu tahap perkembangan kedelapan yang dialami individu selama akhir masa dewasa. Integritas terjadi ketika seseorang pada tahun-tahun terakhir kehidupannya menoleh ke belakang dan mengevaluasi apa yang telah dilakukan dalam hidupnya selama ini, menerima dan menyesuaikan diri dengan keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya, merasa aman dan tenteram, serta menikmati hidup sebagai yang berharga dan layak. Akan tetapi, bagi orang tua yang dihantui oleh perasaan bahwa hidupnya selama ini sama sekali tidak mempunyai makna ataupun memberikan kepuasan pada dirinya, maka ia akan merasa putus asa.

Melalui teori ini, dalam melaksanakan rehabilitasi psikososial maka diperlukan untuk penelusuran mengenai perkembangan psikososial klien korban *trafficking*. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui segala identitas klien yang berguna dalam pengkajian masalah dan perencanaan program pengentasan masalah. Perencanaan program yang dibuat juga dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan klien pada masanya, sehingga tepat dan sesuai serta dapat diterima oleh klien. Sebagai teori yang membahas mengenai aspek psikologis dan sosial seseorang, maka diperlukan melakukan penyadaran terhadap klien yang mengalami masalah psikologis. Misalnya kepada klien yang mengalami trauma atau depresi diberikan motivasi dengan menyadarkan klien bahwa perilaku interpersonal yang sedang dihadapinya mengganggu

dirinya. Oleh karena itu diharapkan klien dapat berubah, yaitu secara psikologis sehat dan secara sosial juga baik.

#### **D. Konsep Rehabilitasi psikososial**

Rehabilitasi psikososial dianggap mampu memenuhi kebutuhan korban perdagangan manusia karena meliputi proses untuk memfasilitasi pemulihan individu untuk mencapai taraf hidup dalam keberfungsian individu di masyarakat. Berikut pengertian rehabilitasi psikososial, tujuan, metode, dan pendampingan dalam rehabilitasi psikososial:

##### **1. Pengertian Rehabilitasi Psikososial**

Rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk mengembalikan kondisi klien secara fisik, psikis dan sosialnya ke kondisi sebelumnya dan mengembalikan keberfungsian klien. Artinya adalah memfungsikan kembali aspek-aspek fisik, emosi, kognisi, dan sosial sepanjang kehidupan individu sehingga mampu melakukan mobilitas, komunikasi, aktivitas harian, pekerjaan, hubungan sosial, dan kegiatan di waktu luang. Sedangkan Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental/emosionalnya. Dilihat dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial<sup>17</sup>. Rehabilitasi psikososial dikonsepsikan secara kesehatan umum, khususnya dalam pengembangan kebijakan dan program dari penyakit mental seperti gangguan kecemasan, depresi, trauma dan sebagainya.

---

<sup>17</sup> Bintarany, Kadek. 2012. *Teori Tentang Psikososial*. <http://informasitips.com/teori-tentang-psikososial> (diakses 26 Oktober 2016 10.53)

Demikian Departemen sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran mendefinisikan pengertian rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali sewajarnya<sup>18</sup>. Rehabilitasi psikososial dimaksudkan agar dapat memulihkan dan juga mengembangkan kemampuan korban yang mengalami disfungsi sosial. Pelayanan tersebut berdasarkan pada profesi pertolongan kesejahteraan sosial, dimana merupakan usaha pertolongan terhadap mereka yang rentan terhadap permasalahan keberfungsian sosial, baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Bentuk pelayanan meliputi : motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, atau rujukan.

## **2. Tujuan rehabilitasi psikososial**

Rehabilitasi psikososial bertujuan untuk merehabilitasi korban yang mengalami trauma secara psikologis maupun fisik bagi korban *trafficking*. Yaitu mengembalikan fungsi sosial seseorang yang mengalami gangguan psikososial akibat menjadi korban *trafficking*. Hal ini secara langsung akan

---

<sup>18</sup> Departemen Sosial RI Direktorat Jendral Bantuan dan Jaminan Sosial Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran tentang Standar Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Kekerasan

melibatkan peran pekerja sosial sebagai pemberi bantuan yang memiliki intelektual dan kapasitas dalam proses ini.

Pekerja sosial menggunakan pendekatan psikososial mempunyai tujuan untuk bekerja sama dengan klien untuk mengembalikan, meningkatkan, dan memobilisasi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi, untuk mengalokasikan sumber-sumber dan menemukan potensi optimal yang sesuai diantara individu dan lingkungan fisik dan sosial<sup>19</sup>.

### **3. Metode penanganan masalah**

Dalam proses penanganan masalah korban perdagangan manusia, diperlukan metode penanganan masalah yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu *assessment, planning, intervention, dan evaluation*. Penjelasannya sebagai berikut<sup>20</sup> :

#### **a. *Assessment* (pengkajian Masalah)**

Tahap yang pertama yaitu *assessment*, dalam *assessment* yang harus terlebih dahulu dilakukan ialah mencari informasi tentang sejarah masalah klien. Pengkajian masalah meliputi pengkajian terhadap sistem informal dan sistem formal yang dimiliki klien. Sistem informal misalnya keluarga, lingkungan maupun teman-teman klien sedangkan dalam sistem formal misalnya kebijakan yang ada dan kurang mendukung klien. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan pada saat *assessment* adalah mengadakan

---

<sup>19</sup> Sya'adillah, Hanifah.2014. *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Rehabilitasi Psikososial Korban Trafficking (Studi Kasus Pada Dua Korban Trafficking di Rumah Perlindungan Trauma Center Bamboo Apus Jakarta)* skripsi tidak diterbitkan. Jakarta : Fakultas Dakwah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hlm 92

<sup>20</sup> Sya'adillah, Hanifah. Ibid Hlm 43



kontak awal dengan klien, mengidentifikasi permasalahan klien, dan mengkaji serta mengumpulkan informasi.

b. *Planning* (perencanaan)

Perencanaan pemecahan masalah adalah suatu proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah , serta penetapan berbagai sumber daya (manusia, biaya, metode/teknik, peralatan , sarana prasarana, dan waktu) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Perencanaan merupakan gabungan dari enam dimensi yaitu : prioritas kebutuhan klien, penetapan tujuan pelayanan, mengidentifikasi sumber daya dan system sumber, adanya batasan-batasan waktu pelayanan dan pencapaian tujuan, adanya target, adanya pembagian tugas yang jelas sehingga jelas pula siapa yang bertanggung jawab.

Dalam perencanaan sebuah *impact goal* atau tujuan besar dan jangka panjang perubahan hidup klien merupakan hasil yang diharapkan. Setelah menetapkan *impact goal* maka selanjutnya ialah merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan.

c. *Intervention* (intervensi)

Pada tahap intervensi kegiatan yang dilakukan yaitu implementasi dari perencanaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kegiatan intervensi yang dilaksanakan adalah melakukan pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada penerima pelayanan dalam bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, bimbingan psikososial, bimbingan sosial, pengembangan masyarakat, resosialisasi, dan advokasi.

*d. Evaluation (evaluasi)*

Sebelum melakukan terminasi, terlebih dahulu dilakukan evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektifitas dari intervensi yang diberikan kepada klien. Dalam tahap ini pekerja sosial menentukan apakah tujuan yang ingin dicapai sudah berhasil atau belum, apakah kemudian klien sudah menerima layanan dengan baik dan korban perdagangan manusia tersebut telah terbantu dalam pemenuhan haknya hingga dapat melanjutkan kehidupannya setelah kembali ke keluarga dan masyarakat.

*e. Termination (Terminasi)*

Terminasi yaitu pemutusan hubungan antara pekerja sosial dengan klien, terminasi dilakukan ketika pelayanan yang diberikan telah selesai atau bilamana terjadi kegiatan referral atau bilamana karena alasan-alasan yang rasional klien minta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor eksternal yang dihadapi pekerja sosial atau karena ada pertimbangan klien lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Terminasi yang tepat yaitu klien telah mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, klien telah mampu mandiri untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tujuan yang dicapai, klien telah berhasil bekerjasama dengan lembaga pelayanan sosial, sistem komunikasinya dan lain-lain.

Sedangkan standarisasi pelayanan yang harusnya dimiliki setiap panti sosial menurut Badiklit Kesos, meliputi :<sup>21</sup>

1. Tahap pendekatan awal

Pada tahap pendekatan awal dilaksanakan kegiatan sosialisasi program, penjangkauan/penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan dan registrasi serta konferensi kasus.

2. Tahap pengungkapan dan pemahaan masalah (*assesement*)

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan analisis kondisi klien, keluarga, lingkungan, karakteristik masalah, sebab dan implikasi masalah, kapasitas mengatasi masalah dan sumber daya serta konferensi kasus.

3. Tahap perencanaan program pelayanan

Pada tahap ini dilaksanakan kegiatan penetapan tujuan pelayanan, penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh klien dan sumber daya yang akan digunakan.

4. Tahap pelaksanaan pelayanan

Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa bentuk kegiatan yang dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan permasalahan klien.

5. Tahap pasca pelayanan

Bentuk pelayanan pada tahap ini yaitu penghentian pelayanan dilakukan setelah klien selesai mengikuti proses pelayanan dan telah mencapai hasil pelayanan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, rujukan dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lainnya yang tidak tersedia di dalam panti,

---

<sup>21</sup> Hariyanto. 2011. *Pelaksanaan proses rehabilitasi sosial untuk anak wanita usia 15-18 tahun korban trafficking (studi kasus di PSKW Mulya Jaya Pasar Rebo)*. Tesis tidak diterbitkan. Depok : FISIP Universitas Indonesia. Hlm 24

pemulangan dan penyaluran dilaksanakan setelah klien dinyatakan berhenti atau selesai mengikuti proses layanan. Pemulangan yaitu kepada keluarga atau sanak saudara tempat klien tinggal.

#### **4. Pendampingan dalam rehabilitasi psikososial**

Pendampingan dalam rehabilitasi psikososial dilakukan oleh pendamping di Rumah aman. Tugas pendamping dalam rehabilitasi psikososial menurut Departemen sosial RI adalah sebagai berikut <sup>22</sup>:

- a. Melakukan penyelamatan (evakuasi) lanjutan. Dalam rangka penyelamatan dengan cara memindahkan korban dari kondisi dan situasi yang dinilai menjadi sumber masalah ke tempat yang lebih kondusif. Pendamping pun menjamin rasa aman dan keselamatan kepada korban.
- b. Melakukan penerimaan dan registrasi. Dalam rangka pencatatan terhadap identitas korban, sebagai penertiban administrasi sebagai calon penerima bantuan sosial korban tindak kekerasan.
- c. Melakukan perlindungan sementara selama di rumah rehabilitasi. Proses penyelenggaraan perlindungan awal korban sebelum dirujuk ke lembaga lain yang diperkirakan mampu memberikan pelayanan yang memadai atau pelayanan lanjutan melalui rehabilitasi psikososial.
- d. Melakukan analisis masalah dan kebutuhan. Proses pengungkapan masalah secara mendalam dan identifikasi yang diperoleh dapat menggambarkan akar masalah dan upaya masalah yang akan dipecahkan.

---

<sup>22</sup> Prabandari, Etika. 2012. *Pelaksanaan Proses Konseling Pada Rehabilitasi Psikososial Terhadap Wanita Yang Menjadi Korban Trafficking (Studi Kasus Pada Tiga Wanita Korban Trafficking di Rumah Perlindungan Trauma Center Bamboo Apus Jakarta)* Jakarta : skripsi tidak diterbitkan. FISIP Universitas Indonesia. Hlm 49

- e. Melakukan bimbingan atau konseling dan motivasi. Dalam rangka pertolongan yang dilakukan secara terarah dan terencana untuk membantu memecahkan masalah, kebutuhan dan identifikasi sumber yang diperlukan korban, sehingga mampu menemukan berbagai alternatif pemecahan, memilih, memutuskan dan menetapkan berbagai alternatif serta usaha untuk menyelesaikannya.
- f. Mengadakan terapi psikososial. Dalam rangka sebagai upaya pemulihan traumatik korban dalam jangka waktu tertentu melalui teknik dan pendekatan terapi psikososial, yang bertujuan agar korban mampu menghilangkan traumatik yang dialaminya.
- g. Melakukan pengalihan pelayanan. Pengalihan korban dari proses pemulihan dan penyembuhan didasarkan pada kebutuhan strategis dan langkah-langkah program lanjutan yang disediakan. Pengalihan pelayanan ini dilakukan dalam bentuk antara lain pelayanan yang tidak dapat diperoleh dari rumah rehabilitasi seperti pemeriksaan medis maupun bantuan hukum.

## **E. Konsep Pekerja sosial**

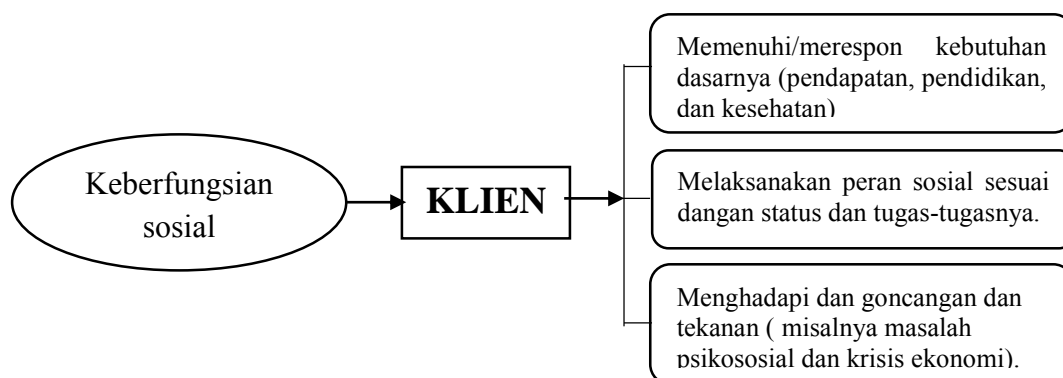
Pekerja sosial adalah orang yang memiliki dasar pengetahuan, keterampilan dan nilai pekerja sosial serta memiliki tugas pokok memberikan pelayanan kesejahteraan. Penjelasan pengertian pekerja sosial, prinsip dan nilai-nilai pekerja sosial serta peran pekerja sosial dalam memberikan pertolongan kepada klien dibawah ini.

### **1. Pengertian pekerja sosial**

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di

lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial<sup>23</sup>. Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk mendorong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut<sup>24</sup>. Sedangkan Siporin mendefinisikan pekerjaan sosial sebagai berikut : *“Social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and resolve their social problems, to restore and enhance their social functioning.”* Yang artinya pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka<sup>25</sup>. Konsepsi tentang keberfungsian sosial dapat dilihat pada bagan 2.1 dibawah ini :

**Bagan 2.1**  
**Konsepsi tentang keberfungsian sosial**



Sumber : Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama

<sup>23</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial Pekerja Sosial Profesional*

<sup>24</sup> Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Meberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama. Hlm 24

<sup>25</sup> Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama. Hlm 60

Jadi Pekerja Sosial adalah seseorang yang melakukan proses pertolongan kepada orang yang mengalami disfungsi sosial dengan disertai kemampuan khusus di bidang ilmu pengetahuan, kemampuan, dan nilai agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Mandat utama pekerja sosial adalah memberikan pelayanan baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkannya sesuai dengan nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan professional pekerjaan sosial.

## **2. Prinsip dan nilai pekerja sosial**

Dalam memberikan pelayanan kepada klien, pekerja sosial memiliki prinsip dasar yang harus dijadikan landasan yaitu, penerimaan, individualisasi, pengungkapan perasaan-perasaan yang bertujuan, sikap tidak menghakimi, obyektivitas, penglibatan emosi secara terkendali, penentuan diri sendiri, akses kepada suberdaya, kerahasiswaan<sup>26</sup>.

### **a. Penerimaan**

Pekerja sosial menerima klien dan memperlakukan mereka secara manusiawi secara baik serta memberikan mereka martabat dan harga diri. Pekerja sosial menyampaikan penerimaan dengan mengungkapkan kepedulian yang sejati, mendengarkan dengan baik, menghormati sudut pandang orang lain, dan menciptakan iklim yang saling menghormati serta menyambut baik pandangan-pandangannya.

---

<sup>26</sup> Damanik Juda. 2008. *Pekerjaan Sosial Jilid 2*. Jakarta : Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Hlm 167

b. Individualisasi

Semua manusia unik dan memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Ketika pekerja sosial menegaskan individualisasi klien, ia mengakui dan menghargai kualitas keunikan dan perbedaan-perbedaan individual itu.

c. Pengungkapan perasaan-perasaan yang bertujuan

Emosi adalah suatu bagian yang integral dari kehidupan manusia, dan manusia mengalami serangkaian perasaan-perasaan. Pekerja sosial harus mengarahkan klien untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang mendasari fakta-fakta. Dengan mendengarkan secara penuh, menanyakan informasi yang relevan, dan mendemonstrasikan toleransi dan sikap tidak menghakimi. Tujuannya untuk membebaskan klien dari tekanan atau ketegangan dan juga mengungkapkan kedalaman pemahaman klien akan masalah-masalah atau bahkan perasaan-perasaannya merupakan masalah.

d. Sikap tidak menghakimi

Sikap tidak menghakimi merupakan landasan bagi relasi kerja yang efektif. Pernyataan bahwa semua manusia memiliki martabat dan harga diri membentuk landasan bagi sikap-sikap tidak menghakimi, sikap-sikap tidak menghakimi tersebut mengandung unsur penerimaan.

e. Obyektivitas

Prinsip praktek obyektivitas, atau menguji situasi-situasi tanpa bias, berkaitan sangat erat dengan pandangan yang tidak menghakimi. Agar obyektif, pekerja sosial menghindari masuknya perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka buruk pribadinya kedalam relasinya dengan klien.



f. Penglibatan emosi secara terkendali

Pekerja sosial yang mengendalikan keterlibatan emosionalnya dengan klien memperoleh perspektif dari pemahamannya akan perilaku manusia, mencari arah bagi relasi dari tujuan umum profesi pekerjaan sosial, dan merespon perasaan-perasaan klien secara sensitif. Belajar mengendalikan respon emosional berkembang seiring dengan pengalaman praktek yang berkelanjutan.

g. Penentuan diri sendiri

Dengan prinsip klien berhak menentukan nasibnya sendiri, pekerja sosial mengakui “hak-dan kebutuhan klien untuk bebas dalam membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusannya sendiri”. Penentuan nasib sendiri berarti pekerja sosial tidak memaksa atau memanipulasi klien bebas atau merdeka dalam membuat pilihan.

h. Akses kepada sumberdaya

Memiliki akses kepada sumberdaya merupakan prasyarat bagi pengembangan solusi. Sumberdaya yang terbatas mengurangi opsi atas solusi-solusi, dan tanpa opsi, manusia tidak dapat memilih diantara alternative-alternatif. Semua manusia menyandarkan diri pada sumberdaya untuk memenuhi tantangan dan mewujudkan potensinya.

Kode etik pekerjaan sosial mewajibkan pekerja sosial untuk menjamin agar setiap orang memiliki sumberdaya, pelayanan, dan kesempatan yang ia butuhkan untuk mengembangkan pilihan-pilihan dan kesempatan untuk meningkatkan kondisi sosialnya.

i. Kerahasiaan

Kerahasiaan atau hak atas privasi berarti klien harus memberikan izin yang cepat untuk membuka informasi seperti identitasnya, percakapannya dengan pekerja sosial, pendapat pekerja sosial tentang dia, atau catatan-catatan kasusnya. Karena klien seringkali membicarakan hal-hal yang sensitif dan pribadi maka pekerja sosial harus menjamin kerahasiaan atas segala informasi. Hal ini juga untuk mengembangkan kepercayaan klien terhadap pekerja sosial.

Selain prinsip-prinsip pekerjaan sosial, adapun nilai-nilai dalam pekerjaan sosial yang melandasi praktek dalam pekerjaan sosial. Landasan nilai profesi pekerjaan sosial mencerminkan keyakinan-keyakinan yang mendasar tentang hakekat manusia, perubahan, dan kualitas yang melekat padanya.

*Council on Social Work Education (CSWE)*, Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Amerika Serikat mengidentifikasikan beberapa nilai-nilai inti sebagai pusat bagi semua level pendidikan pekerjaan sosial. Pernyataannya konsisten dengan nilai-nilai pekerjaan sosial yang dianut oleh organisasi-organisasi profesi lain seperti *National Association of Social Workers (NASW)*, Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat dan *International Federation of Social Workers (IFSW)*, Ikatan Pekerja Sosial Internasional). Menurut CSWE (2001). Profesi pekerjaan sosial didasarkan atas nilai-nilai pelayanan, keadilan sosial dan ekonomi, martabat dan harga diri manusia, pentingnya relasi manusia, dan integritas serta kompetensi praktek. Dengan nilai-nilai ini sebagai prinsip-prinsip yang menegaskan, tujuan-tujuan pekerjaan sosial ialah<sup>27</sup>:

---

<sup>27</sup> Damanik, Ibid. hlm 175

- a. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan memerangi kemiskinan, tekanan, dan bentukbentuk lain ketidakadilan sosial.
- b. Meningkatkan keberfungsian sosial dan interaksi individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat dengan melibatkan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan, mengembangkan sumberdaya-sumberdaya, dan mencegah serta mengurangi ketegangan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan, pelayanan-pelayanan, dan program-program sosial, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan mendukung pengembangan kemampuan-kemampuan manusia.
- d. Mengejar kebijakan-kebijakan, pelayanan-pelayanan, dan sumberdaya-sumberdaya melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial atau politik yang mempromosikan keadilan sosial dan ekonomi.
- e. Mengembangkan dan memanfaatkan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan-keetrampilan yang memajukan praktek pekerjaan sosial.
- f. Mengembangkan dan menerapkan praktek di dalam konteks kebudayaan-kebudayaan yang beraneka ragam.

### **3. Peran pekerja sosial**

Menurut Parson ada beberapa peran pekerja sosial yang dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial, yaitu pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, pelindung. Sebagaimana penjelasan dibawah ini<sup>28</sup>:

---

<sup>28</sup> Suharto, Edi. Opchit. Hlm 97

a. Fasilitator

Memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertanggungjawab membantu klien mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

b. *Broker*

Menghubungkan klien dengan barang-barang dan pelayanan serta mengontrol kualitas barang dan pelayanan tersebut. Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pelaksanaan peran sebagai broker, yaitu menghubungkan orang dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak lainnya yang memiliki sumber-sumber yang diperlukan. Barang-barang dan pelayanan seperti makanan, uang, pakaian, perumahan, obat-obatan serta perawatan kesehatan, konseling, pegasuhan anak.

c. Mediator

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam melakukan peran mediator meliputi kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, serta berbagai macam resolusi konflik. Dalam mediasi, upaya-upaya yang dilakukan pada hakekatnya diarahkan untuk mencapai solusi.

d. Pembela

Peran pembelaan dapat dibagi menjadi dua yaitu advokasi kasus (*case advocacy*) dan advokasi kausal (*cause advocacy*). Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembela kausal terjadi manakala klien yang

dibela pekerja sosial bukanlah individu melainkan sekelompok anggota masyarakat.

e. Pelindung

Pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan program, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup peranan berbagai kemampuan yang menyangkut kekuasaan, pengaruh, otoritas dan pengawasan sosial.

Penjelasan di atas mengkaji tentang peran pekerjaan sosial yang diperlukan untuk mencapai tanggung jawab dan memperbaiki atau mengembangkan interaksi antara individu atau kelompok individu dengan lingkungan sosial mereka, sehingga klien memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan, mewujudkan aspirasi serta nilai-nilai mereka dan berfungsi secara sosial.

## **F. Tinjauan Kesejahteraan Sosial dalam Rehabilitasi Psikososial**

Masalah perdagangan manusia (*trafficking*) dewasa ini merupakan salah satu masalah sosial yang semakin marak yang ada ditengah masyarakat. Sebagian orang yang kurang beruntung akhirnya terjatuh dalam praktek perdagangan manusia khususnya perempuan. Kejahatan *trafficking* ini merupakan permasalahan vital yang harus mendapatkan respon secara efektif. Karena dampak yang ditimbulkan oleh para korban selain dari segi fisik juga dari segi psikologis. Dampak psikologis inilah yang merupakan masalah baru serta dapat mengganggu kehidupan korban, karena dapat menjadi dampak yang permanen. Sebagian besar korban mengalami

depresi, gangguan panik, gangguan perkembangan mental, gangguan perilaku dan emosi, perilaku egresif, phobia, insomnia hingga stress pasca traumatik.

Oleh karenanya, mereka para korban perlu mendapat pelayanan rehabilitasi psikososial guna mencapai kesejahteraan sosial yang lebih baik. Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya<sup>29</sup>.

Kesejahteraan sosial sebagai kondisi ideal untuk dapat mengembangkan diri korban sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang wanita sesuai dengan perannya di masyarakat. Ada berbagai metode intervensi dalam mencapai kesejahteraan sosial korban perdagangan manusia tersebut. Intervensi tersebut sebagai upaya perubahan terencana terhadap korban perdagangan manusia, dimana tujuan dari intervensi tersebut ialah untuk memperbaiki keberfungsian sosialnya.

Rehabilitasi psikososial merupakan salah satu bentuk intervensi untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. melalui rehabilitasi psikososial ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan memulihkan keberfungsian sosial korban perdagangan manusia. Dalam proses pelayanan rehabilitasi psikososial ini, korban diberikan bimbingan mental yang bertujuan untuk agar korban dapat sembuh dari dampak psikologis yang dialaminya dan dapat memahami diri sendiri dan orang lain serta selalu berpikiran positif.

Dalam pelayanan rehabilitasi psikososial ini dibutuhkan peran Pekerja sosial sebagai pelaksana identifikasi dan assessment terhadap klien korban

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial*

perdagangan manusia. Dimana pekerja sosial sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai dalam memberikan pelayanan kepada klien. Peran pkerja sosial dalam proses ini ialah sebagai fasilitator, broker, mediator, pembela, dan pelindung.